

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH (STUDI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020)**

**Oleh
Rizky Alvino
NIM. 180565201021**

Abstrak

Barang Milik Daerah merupakan aset yang dimiliki pemerintah daerah, kompleksitas pengelolaan aset yang tidak optimal memberikan permasalahan pada laporan keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan faktor penghambat implementasi kebijakan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan dengan menggunakan teori model implementasi dari George Edward III. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 5 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan belum berjalan baik. Dilihat dari indikator komunikasi belum sepenuhnya berjalan baik, karena dalam pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan komunikasi diantara pelaksana kebijakan hanya sebatas himbauan, dan menunggu arahan pimpinan. Sumber daya belum memadai, dari finansial dan fasilitas. Disposisi, belum berjalan optimal pelaksana kebijakan belum sepenuhnya memahami kebijakan. Dan Terakhir ialah pada struktur birokrasi belum tersedianya *Standart Operating Procedur* (SOP). Kemudian terdapat faktor penghambat implementasi pengelolaan barang milik daerah ialah pertama, kurangnya Kejelasan dan kesadaran terhadap Komunkasi. Kedua, staf tidak mengetahui informasi terkait keberadaan fisik, tidak memadai fasilitas gudang penyimpanan barang, dan keterbatasan anggaran pemeliharaan. Ketiga, kurangnya pemahaman serta komitmen pelaksana kebijakan. Keempat, tidak tersedianya *Standart Operating Procedur* (SOP) pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Kata Kunci : Implementasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Barang Milik Daerah.

**IMPLEMENTATION OF POLICY REGULATION OF BINTAN
REGENCY NUMBER 4 OF 2017 REGARDING MANAGEMENT OF
REGIONAL PROPERTY (STUDY AT THE DEPARTMENT OF LIBRARY
AND REGIONAL ARCHIVES OF BINTAN REGENCY IN 2020)**

**By
Rizky Alvino
Nim. 180565201021**

Abstract

Regional property is an asset owned by the regional government, the complexity of asset management that is not optimal gives problems to regional financial reports. The purpose of this study was to determine the implementation of the policy of the Bintan Regency Regional Regulation Number 4 of 2017 concerning Management of Regional Property and the inhibiting factors for policy implementation at the Regional Library and Archives Service of Bintan Regency by using the theory of the implementation model of George Edward III. The method used is descriptive qualitative with 5 informants and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews and documentation. Based on the research conducted, the results obtained that the implementation of the policy of the Bintan Regency Regional Regulation Number 4 of 2017 concerning the Management of Regional Property at the Regional Library and Archives Service of Bintan Regency has not gone well. Judging from the indicators of communication, it has not fully gone well, because in the implementation of security and maintenance, communication between policy implementers is only an appeal, and waiting for leadership directions. Inadequate resources, in terms of finances and facilities. Disposition, policy implementers have not fully understood the policy yet. And finally, in the bureaucratic structure, there is no Standard Operating Procedure (SOP). Then there are inhibiting factors for the implementation of regional property management, namely first, the lack of clarity and awareness of communication. Second, staff do not know information regarding physical presence, inadequate warehouse facilities for storing goods, and limited maintenance budget. Third, the lack of understanding and commitment of policy implementers. Fourth, the unavailability of Standard Operating Procedures (SOP) for securing and maintaining regional property.

Keywords: Implementation, Security, Maintenance, Regional Property.